

The Legal Instrument to Resolve the Problem of Imbalanced Contractual Relationship between Musician and Label on Royalty Payment in Indonesian Music Industry

by:

Giok Kinski M D A¹ and Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

This research aims to analyze what kind of legal instrument that can be used to mitigate the imbalanced contract between musician and label. This is because in terms of bargaining power, musician is inferior compared to the label. The law is silent on the minimum protection for the musician that should be covered in the contract in terms of music royalty. Due to the need of the copyright protection and for the sake of creative economic optimization on Indonesian music industry, it becomes important to conduct a legal research for this matters.

This normative-empirical research relies dominantly on literature study added with field research to provide insights of the position of the actors involved in the industry.

The finding of this research shows that the imbalanced contract is resulted from 3 factors namely; (1)disparity of knowledge on copyright between musician and label; (2)legal vacuum on the standards that should be conferred to the musician; (3)copyright concept is not familiar yet in the developing countries. Further, in order to improve the imbalanced contract, it could invoke the copyright regime in developed countries, precisely the US Copyright Law and EU Directives. The legal instruments that can be used as reference are pertaining to the concept of the transfer of copyright, information disclosure and also opportunity for contract renegotiation.

Keywords: copyright, economic rights, music royalty, royalty dispute

¹ Student of faculty of law LLM program, Business Law Department, Class of 2020, Universitas Gadjah Mada.

² Associate Professor of Faculty of Law, Business Law Department, Universitas Gadjah Mada.

Instrumen Hukum untuk Memecahkan Masalah Ketimpangan Kontrak antara Musisi dan Label atas Pembayaran Royalti di Industri Musik Indonesia

oleh:

Giok Kinski M D A¹ and Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memitigasi ketimpangan kontrak antara musisi dan label. Hal ini karena dalam hal kekuatan tawar-menawar, musisi menjadi inferior apabila dibandingkan dengan label. Tidak ada peraturan hukum terkait perlindungan minimal untuk musisi yang seharusnya dicakup dalam suatu kontak kaitannya dengan royalti musik. Dikarenakan kebutuhan atas perlindungan hak cipta dan demi pengoptimalan ekonomi kreatif di industri musik Indonesia, maka menjadi penting untuk mengadakan penelitian terhadap topik ini.

Penelitian normatif-empiris ini menggunakan studi kepustakaan ditambah dengan penelitian lapangan untuk mengetahui perspektif para pelaku dalam industri musik di Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan kontrak disebabkan oleh 3 faktor yaitu; pertama, kesenjangan pengetahuan antara musisi dan label terhadap hak cipta; kedua, kekosongan hukum atas peraturan jumlah minimal royalti yang harus diterima musisi; ketiga, konsep hak cipta yang masih asing khususnya di negara-negara berkembang. Selanjutnya, untuk memperbaiki ketimpangan kontrak, perbaikan dapat dilakukan dengan mengambil pelajaran terkait pengaturan hak cipta di negara-negara maju, secara spesifik yakni Undang-Undang Hak Cipta di Amerika Serikat dan EU Directives. Instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan adalah terkait dengan konsep pengalihan hak cipta, keterbukaan informasi dan juga klausul untuk renegotiasi kontrak.

Kata kunci: hak cipta, hak ekonomi, muk royalti, sengketa royalti

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Program LLM, Departemen Hukum Bisnis, Kelas 2020, Universitas Gadjah Mada.

² Associate Professor Fakultas Hukum, Departemen Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada.